

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
MANGROVE TONGKE TONGKE (STUDI KASUS  
MASYARAKAT SEKITAR KECAMATAN  
SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI)**



**SKRIPSI**

*Di ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana*

*Pendidikan pada program studi pendidikan sosiologi*

*Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*

*universitas muhammadiyah makassar*

**Oleh:**

**Rahmi Syam**

**10538275513**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
SEPTEMBER 2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove  
Tongke Tongke (Studi Kasus Masyarakat Sekitar Kecamatan  
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai).

Nama : Rahmi Syam

Nim : 10538275513

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk  
dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Oktober 2017

Ditahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurjani Subair, M.Si.

Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Erwin A. M.Pd., Ph.D  
NBM: 900 934

Ketua Prodi  
Pendidikan Sosiologi  
Dr. H. Nursalam, M.Si  
NBM: 951 829



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 152 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Rahmi Syam, NIM 10538275513** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1079 Tahun 1439 H/2017 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017.

26 Muharram 1439 H  
Makassar, -----  
16 Oktober 2017 M

**PANITIA UJIAN**

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
2. Kaharuddin, M.Pd., Ph.D.
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si
4. Dr. Munirah, M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP

Universitas Muhammadiyah Makassar



**Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.**  
NBM: 860 934

Ketua Prodi

Pendidikan Sosiologi



**Dr. H. Nursalam, M.Si**  
NBM: 951 829

## **PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini ku persembahkan kepada ayahanda Syamsuddin dan Syamsiah yang teristimewa ku persembahkan untuk keduanya atas pengorbanan mulia nan suci yang telah memberikan doa yang tiada putus putusnya*

*Semoga Allah SWT berkenan memberikan taufiq rahmatnya, mengampuni dosa dosanya dan dan membalas semua jasa jasanya dengan balasan yang terbaik di sisi-Nya*



*MOTTO*

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.”(QS.Al-insyirah 6-8)**

**Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya,  
Hidup di tepi jalan dan di lempari orang dengan batu  
Tetapi di balas dengan buah.**



## KATA PENGANTAR

Allah maha penyayang dan pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada derik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika di dekati. Demikian juga penulis ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam rung lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Syamsuddin dan Syamsiah yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menmaniku dengan candanya, kepada, Dr.Nurlina Subair, M.Si dan Jamaluddin Arifin, S.Pd M.Pd sebagai

pembimbing I dan pembimbing II, yaang telah memeberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat

Dr. H. Abd. Rahman Rahim,SE,MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd. Ph.D, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. H. Nursalam, M.Si, ketua prodi program studi pendidikan sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Tamzil Binawan Selaku Camat Sinjai timur yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku Dina Oktaviana, Fitriani Liga, Mardia umar dan seluruh kelas D sosiologi yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih, juga berjasa dalam proses pendidikan penulis, memberikan segenap bantuannya dan motivasinya. Serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama

sekali tanpa adanya kritikan.mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, September 2017

Penulis



## ABSTRAK

**Rahmi Syam 2017.** *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove tongke tongke (studi kasus masyarakat sekitar kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai).* Dibimbing oleh Nurlina Subair. dan Jamaluddin Arifin,

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan dampak pengelola ekosistem mangrove pada masyarakat. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi para pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove di Kelurahan Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif. Adapun sumber analisis ini berasal dari pengelola data yang di peroleh dari wawancara secara mendalam.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi masyarakat terhadap pengelola ekosistem mangrove di kelurahan Tongke-Tongke yang di analisis secara deskriptif kualitatif, maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah berpartisipasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove antara lain, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan, sedangkan bentuk Partisipasi masyarakat dalam pengelola ekosistem mangrove di kelurahan Tongke-Tongke, antara lain meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan.

*Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pengelolaan hutan mangrove*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, DAN KERANGKA KONSEP	
A. Konsep partisipasi dan pengembangan wisata.....	13

1. Konsep partisipasi .....	13
2. Pemberdayaan pengembangan wisata.....	14
B. Asas manfaat hutan mangrove .....	16
C. Kerangka Pikir.....	26

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Fokus penelitian.....	30
E. Instrument penelitian .....	30
F. Jenis dan sumber data penelitian.....	31
G. Teknik pengumpulan data.....	31
H. Teknik analisis data.....	32
I. Tehnik keabsahan data.....	33

### BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi wilayah peneltian .....	35
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	35
2. Batas wilayah tempat penelitian.....	39
3. Sejarah kabupaten sinjai .....	39
4. Wilayah kabupaten sinjai.....	43
5. Bupati sinjai dari masa ke masa .....	43
6. Peta kabupaten sinjai .....	44

BAB V BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENELOLAAN  
HUTAN MANGROVE

A. Bentuk partisipasi masyarakat.....	45
B. Implikasi partisipasi .....	53

BAB VI PERAN PEMERINTAH DI DALAM MELESTARIKAN HUTAN  
MANGROVE

A. Peran pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove .....	57
---	----

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	68
----------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Kerangka pikir.....	26
Daftar informan.....	xi



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak di berlakukannya undang undang No.22 tentang pemerintahan daerah telah terjadi banyak pola kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dimungkinkan karna Sumber daya alam merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di suatu daerah baik dalam konteks negara, provinsi maupun kabupaten, oleh karnanya aspek pemanfaatannya merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan.

Menurut Nyabakken (1988), hutan mangrove adalah sebutan umum yang di gunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang di dominasi oleh beberapa spesies yang khas atau semak semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove di sebut juga *coastal woodland*(hutan pantai) yang merupakan formasi tumbuhan litoral yang karakteristiknya terdapat di daerah tropika.

Pengelolaan Sumber daya alam dalam perspektif otonomi daerah pada dasarnya adalah power sharing kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten atau kota. Tumbuhan merupakan bagian yang penting yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah obyek wisata, tumbuhan juga berpengaruh terhadap kondisi udara di sekitarnya semakin

banyak tumbuhan maka udara di sekitarnya juga semakin sejuk, desa tongke tongke adalah merupakan kawasan hutan mangrove yang di jadikan sebagai obyek wisata, jenis mangrove yang di swadayakan masyarakat setempat yaitu jenis bakau.

Partisipasi masyarakat seringkali di anggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dengan melihat partisipasi sebagai bagian yang tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat akan dapat di ketahui bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas adalah asumsi bahwa “Masyarakat bukanlah kumpulan orang yang bodoh yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah atau (instruksi) belaka. Partisipasi masyarakat yang di maksud di sini adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat lebih menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.

Sebaliknya bila masyarakat tidak banyak di libatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang di rencanakan, partisipasi di gunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan dalam hal ini, partisipasi di maknai sebagai suatu proses yang memapukan

(enable) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengamil keputusan sendiri trntang alternatif pemecahan masalah apa yang mereka ingin pilih. Di sini Chambers menggambarkan bahwa "kita" (perilaku perubahan) berpartisipasi dalam proyek "mereka" (masyarakat lokal) sehingga terjadi apa yang di sebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan ekosistem hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan berbagai kepentingan (pemerintah dan masyarakat), ilmu pengetahuan dan pengelolaan, dan kepentingan sektoral dan masyarakat umum. Pengelolaan berbasis masyarakat disini adalah bahwa penggunaan dari sumberdaya yang utama yaitu masyarakat dan harus menjadi aktor pengelola sumberdaya tersebut. Keterkibatan masyarakat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara berkelanjutan pada sumberdaya, dan pada umumnya kelompok masyarakat yang berbeda akan berbeda pula dalam kepentingannya terhadap sumberdaya tersebut. Pengelolaan sumberdaya tidak akan berhasil tanpa mengikut sertakan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Suatu pembangunan berbasis masyarakat dapat terbentuk, jika ada suatu kelompok berkolaborasi, karena mereka sadar tidak dapat mengerjakan suatu tugas sendiri-sendiri dan tidak dapat mencapai tujuan secara individual baik karena sifat dari tugas atau tujuan itu sendiri, maupun karena keterbatasan sumber-sumber. Kebersamaan dan kesamaan dalam perhatian, kepedulian, biasanya membuat masyarakat bersatu. Jika kebersamaan itu melembaga, dan

menimbulkan kesetiakawanan, rasa saling percaya, terciptanya aturan-aturan main, maka inilah dasar dari terbentuknya basis masyarakat. Sehingga strategi yang tepat perlu dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan bentuk nyata dari masyarakat pesisir itu sendiri. Adanya partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Banyak program dan kegiatan pengelolaan yang kurang berhasil dikarenakan pelaksanaan program yang gagal melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal program.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove pada dasarnya adalah upaya melibatkan masyarakat agar secara sadar dan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan mangrove. Keterlibatan dapat terwujud apabila seseorang merasa bahwa keikutsertanya dapat memberikan manfaat bagi dirinya, dimana manfaat tersebut tidak hanya dalam bentuk fungsi hutan mangrove yang sifatnya dirasakan dalam jangka pendek. Berdasarkan hasil analisis faktor partisipasi dan pengelolaan hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan sinjai timur.

Di bagian timur laut kabupaten sinjai jejeran dan rimbunan hutan bakau yang tertera alami, pesisir laut tongke tongke menampilkan keindahan panorama alam serta adanya kelelawar yang bergelantungan pada setiap bulan april sampai bulan september mengikuti musim adaptasi lingkungan spesies binatang tersebut, kawasan mangrove ini di jadikan sebagai kunjungan wisatawan yang terbebukti banyak di minati oleh wisatawan mancanegara.

Desa tongke tongke yang di kenal dengan hutan bakaunya lebih di kenal dengan laboratorium bakau sulawasi selatan yang dikembangkan dengan swadaya dan budidaya masyarakat secara murni sebuah jalan kayu yang telah permanen serta villa terapung dalam kawasan yang telah menjadi momok utama dalam pengembangan kepariwisataan sebagai animo masyarakat melalui pemerintah untuk bersinergi dalam mengelola aset wisata tersebut

Di samping itu masyarakat setempat dan pemerintah telah menyediakan sarana transportasi laut yang bersandar di pesisir hutan bakau yang mana di persiapkan bagi wiatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk lebih menikmati keindahan hutan bakau dari luar dan biota laut serta keanekaragaman hayati yang menyatu dengan alam hutan bakau dari sektor perkebunan dan perikanan juga telah memfasilitasi sebuah sanggar tani yang di jadikan sebagai pusat pelatihan bakau dan aktifitas para sanggar tani wanita yang lebih berorientasi pada pemeliharaan bakau.

Potensi yang terhampar di hadapan kita adalah sebuah nilai yang tertinggi untuk dikelola pemerintah dan masyarakat telah bersinergi untuk mengembangkan kawasan wisata tongke tongke secara berkelanjutan sisa waktu menunggu investasi untuk melanjutkan dan mengembangkan untuk kedepannya sehingga kawasan wisata tongke tongke semakin banyak di minati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, upaya pelestarian hidup hutan bakau yang selama ini di jadikan sebagai tumpuan masyarakat setempat untuk melangsungkan proses dari rantai biota laut sehingga perkembangan tambak mereka pun

meningkat namun dengan adanya sektor kepariwisataan telah mampu menambah ekonomi kerakyatan bagi masyarakat setempat dan menjadikan suatu bahan ekspos kedepan dengan potensi wilayah mereka yang eksotis di bandingkan dengan potensi daerah lain.

Berapa peneliti terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove:

Rachman (1998) meneliti tentang Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Keamanan Hutan (Kasus Desa Pelang Lor, Kedunggalar - Ngawi). Adapun hasil dalam penelitian ini adalah : 1) mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan di desa pelang meliputi Tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan sangat ditentukan oleh mata pencaharian mereka 2) menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan di desa pelang 3) menganalisis sejauh mana pengaruh konservasi hutan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat desa pelang. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari peran serta LMDH dan BKPH dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan, di samping kearifan lokal. Meskipun demikian tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, maupun akses masuk desa ikut mempengaruhi kepedulian masyarakat dalam usaha konservasi hutan. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan harus ditingkatkan karena akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena pola kehidupan masyarakat terbentuk akibat adanya hutan di sekitarnya.

Saptorini (2003) Meneliti tentang Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Undip Press. Ada pun hasil penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang mangrove kabupaten demak Persepsi masyarakat tentang mangrove dapat dikatakan sudah cukup baik, yakni telah terbentuk suatu persepsi tentang hutan mangrove yakni sebagai tanaman yang bermanfaat untuk penahan gelombang sehingga mengurangi abrasi pantai dan erosi di tanggul tambak.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Surodadi Kabupaten Demak, Kawasan pesisir di sepanjang Desa surodadi dahulu merupakan kawasan dengan ekosistem mangrove yang cukup terjaga dan cukup bagus. Pesatnya konversi lahan di wilayah pesisir kabupaten demak terutama untuk area pertambakan dan pemukiman serta kebutuhan masyarakat akan lahan pemukiman yang akan terus bertambah dan kebutuhan akan kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar menyebabkan hutan mangrove yang telah tumbuh secara alami mengalami degradasi yang cukup parah keberadaan hutan mangrove yang semakin tipis dan cenderung menghilang menyebabkan wilayah pesisir menjadi wilayah yang jarang terjadi abrasi dan banjir laut atau rob.hal menerus menimbulkan kesadaran masyarakat untuk rehabilitasi hutan mangrove memerlukan partisipasi aktif masyarakat sehingga hutan hasil rehabilitasi tersebut akan dikelola secara lestari dan dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama sama mengkaji tentang hutan mangrove metode yang di

gunakan dalam penelitian ini sama sama menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, perbedaannya dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada lokasi, lokasi di kabupaten demak sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah berada di kabupaten sinjai. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai, Ekosistem hutan mangrove di kabupaten sinjai merupakan hasil rehabilitasi pantai yang terbangun dan berkembang dari partisipasi masyarakat secara swadaya umumnya tanaman mangrove tumbuh dengan baik dan subur membuat habitat ekosistem hutan mangrove yang unik. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Wesli, 2011). Menurut Suciati (2006) Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsure kesetaraan dan kedaulatan dari pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.

Rahardjo dalam Mardijono (2008:19) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis telah melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ***“Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke (Studi kasus masyarakat sekitar kec.sinjai timur kab.sinjai)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka permasalahan di fokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai?
2. bagaimana Peran Pemerintah di dalam melestarikan hutan mangrove tongke tongke di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke di kec.sinjai timur kab.sinjai
2. Untuk mengetahui peran pemerintah di dalam melestariakan hutan mangrove tongke tongke di kec.sinjai timur kab.sinjai

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan pendidikan sosiologi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik terkait sehingga studi sosiologi mampu menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

### **E. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul dari masalah tersebut di atas maka yang menjadi defenisi operasional adalah:

1. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan, program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materil
2. Masyarakat adalah sekumpulan yang tinggal dalam suatu tempat dalam jangka waktu yang relatif lama.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.
4. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah tepi pantai yang di pengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantai hutannya selalu tergenang air dan hutan mangrove adalah sebutan umum yang di gunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropic yang di dominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin, ekosistem hutan bakau bersifat khas baik karna adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi

tanah, hanya sedikit saja tumbuhan yang bertahan hidup di tempat ini dan kebanyakan bersifat khas hutan bakau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Konsep Partisipasi Dan Pemberdayaan Pengembangan Wisata

##### 1. Konsep partisipasi

Partisipasi masyarakat seringkali di anggap sebagai bagaian yang tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat terkait dengan konsep partisipasi ini (Mikkelsen (2005:53) melihat bahwa konsep partisipasi telah menjadi bagian dari debat yang berkepanjangan antara lain terkait landasan teoritis, dan kemungkinan akan di terapkannya (*Participation applicability*) dalam kaitan berbagai program pembangunan yang di laksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan lembaga nono pemerintah, istilah partisipasi dan partisipatoris menurut Mikkelsen (2005:53-54) biasanya di gunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum seperti berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi dari masyarakat dalam proyek (pembangunan) tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan
2. Prtisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang di tanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.

4. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang di tentukan sendiri oleh masyarakat.

Beberapa pengertian partisipasi menurut Mikkelsen kadangkala lebih merupakan kata kata yang populer yangt sering di gunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya (*Genuine Participation*) paerisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2005:54) berasal dari masyarakat dan di kelola oleh masyarakat itu sendiri.

## 2. Pemberdayaan pengembangan wisata

(Sadan 1997), pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk

mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya pemberdayaan di letakkan pada tingkat kekuatan, tingkat individu, dan sosial.

Pemberdayaan pengembangan wisata hutan mangrove tongke tongke pada dasarnya hutan mangrove tongke tongke bukanlah hutan baru melainkan hutan yang berpuh puluh tahun yang lalu melalui partisipasi masyarakat hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat sekitar untuk mengembangkan tempat pariwisata hutan mangrove tersebut, pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat yang mampu menciptakan potensi alam menjadi jauh lebih baik dan lebih bermanfaat, pada saat ini pemerintah kabupaten sinjai telah berupaya mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang pengelolaan lingkungan dan pelarangan penebangan hutan mangrove sehingga dapat memajukan tempat wisata tersebut.

## B. Asas manfaat hutan mangrove

### a. Pariwisata

pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung maupun menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga terdapat timbal balik antara masyarakat dan pariwisata, pariwisata yang ada di sinjai yang di kelolah dari partisipasi masyarakat dan pemerintah, potensi hutan tumbuhan merupakan tumbuhan yang penting yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah objek wisata tumbuhan juga berpengaruh terhadap kondisi udara di sekitarnya semakin banyak tumbuhan maka semakin banyak pula maka udara di sekitarnya juga menjadi semakin sejuk, desa tongke tongke adalah merupakan kawasan hutan mangrove yang di jadikan sebagai salah satu objek wisata yang paling banyak di kunjungi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara jenis mangrove yang di swadayakan masyarakat setempat yaitu jenis bakau (*Ryzophora mucorata*).

Lokasi objek wisata mangrove tongke tongke yang berada di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai ini sangat tepat untuk pengembangan objek wisata mangrove, karena daerah ini merupakan kawasan konservasi hutan mangrove yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sinjai sebagai kawasan hutan mangrove yang di lindungi. Kawasan yang di jadikan sebagai konservasi hutan mangrove yang di lindungi.

pariwisata di katakan mempunyai energi yang cukup besar yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek dalam

kehidupan mereka bahkan banyak negara yang bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan, oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang di gunakan masyarakat untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan meningkatkan penjualan melalui jasa kepada orang non lokal.

Kawasan hutan mangrove tongke tongke yang di jadikan sebagai salah satu tempat wisata paling terkenal di sinjai karna hutan mangrove yang ada di desa tongke tongke tongke memiliki berbagai pemandangan yang menarik sehingga kawasan tersebut banyak di minati oleh oleh wisatawan di samping itu masyarakat setempat dan pemerintah telah menyediakan sarana transportasi laut yang bersandar di pesisir hutan bakau yang mana di disiapkan bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk lebih menikmati keindahan hutan bakau dari luar dan biota laut serta keanekaragamana hayati yang menyatu dengan alam hutan bakau dari sektor perkebunan dan perikanan juga telah memfasilitasi sebuah sanggar tani yang di jadikan sebagai pusat pelatihan bakau dan aktifitas para sanggar tani wanita yang lebih berorientasi pada pemeliharaan bakau.

Potensi yang terhampar di hadapan kita adalah sebuah nilai yang tertinggi untuk dikelola pemerintah dan masyarakat telah bersinergi untuk mengembangkan kawasan wisata tongke tongke secara berkelanjutan sisa waktu menunggu investasi untuk melanjutkan dan mengembangkan untuk kedepannya sehingga kawasan wisata tongke tongke semakin banyak di minati oleh wisatawan

mancanegara maupun wisatawan lokal, upaya pelestarian hidup hutan bakau yang selama ini di jadikan sebagai tumpuan masyarakat setempat untuk melangsungkan proses dari rantai biota laut sehingga perkembangan tambak mereka pun meningkat namun dengan adanya sektor kepariwisataan telah mampu menambah ekonomi kerakyatan bagi masyarakat setempat dan menjadikan suatu bahan ekspos kedepan dengan potensi wilayah mereka yang eksotis di bandingkan dengan potensi daerah lain.

Berkaitan dengan sektor pariwisata di kenal istilah pariwisata dan pelancong kedua istilah ini tentunya berhubungan dengan orang yang melakukan pariwisata, wisatawan adalah seseorang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dan berdiam di tempat itu lebih dari 24 jam dengan beberapa tujuan, untuk menggunakan waktu senggang baik di pergunakan waktu rekreasi atau berlibur ,pariwisata hutan mangrove tongke tongke kecamatan sinjai timur mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat manfaat pariwisata dapat di lihat dari segi Ekonomi, Sosial dan budaya:

1) Manfaat dari segi ekonomi

- (a) Masyarakat sekitar yang ada di sinjai timur juga dapat memperoleh penghasilan dengan berjualan snack, minuman dingin, kopi dan masih banyak banyak lagi dengan adanya warung makan ini dapat memenuhi kebutuhan makan bagi wisatawan hutan mangrove tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang tinggal di sekita hutan mangrove tersebut.

- (b) Masyarakat sekitar juga dapat memanfaatkan tanahnya yang kosong yang di sekitaran hutan mangrove dapat di jadikan sebagai tempat parkir bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan wisata hutan mangrove tongke tongke dan tarif yang di kenakan oleh para wisatawan bagi kendaraan roda dua yaitu Rp.2000 sedangkan untuk roda 4 sekitar Rp.4000-Rp.5000
- (c) Masyarakat juga banyak yang menyewakan perahu bagi wisatawan lokal maupun manca negara yang ingin lebih menikmati panorama alam yang ada di kawasan hutan mangrove tongke tongke.
- 2) Manfaat dari segi sosial
- (a) Mendorong pembelajaran bahasa asing dan keterampilan baru, masyarakat daerah pariwisata akan terdorong mempunyai keterampilan bahasa asing agar lebih mudah berinteraksi dengan wisatawan mancanegara
- (b) Dapat menimbulkan perasaan bangga kepada masyarakat dan pemerintah akan pariwisata yang ada di daerah sinjai sehingga dapat menimbulkan kesadaran untuk sama sama menjaga dan melestarikan pariwisata tersebut.
- 3) Manfaat dari segi budaya
- (a) Terjadi interaksi budaya antara budaya local dengan budaya pengunjung yang akan membawa mereka pada rasa saling menghargai satu sama lain

- (b) Mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas sehingga budaya tersebut tidak akan cepat luntur dan hilang karena adanya sosialisasi budaya

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sisi ekologis maupun aspek sosial ekonomi. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ditumbuhi dengan pohon bakau (*mangrove*) yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan.

Sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam, pemanfaatan mangrove diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk mewujudkan pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola dan dijaga keberadaannya. Kerangka pengelolaan hutan mangrove terdapat dua konsep utama. Pertama, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. Kedua, rehabilitasi hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain.

Pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi masyarakat, lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta melakukan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung pengelolaan mangrove, peningkatan penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai serta. Pada prinsipnya posisi model pengelolaan hutan mangrove yang di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai masuk dalam kategori pertumbuhan.

#### b. Lingkungan

Meningkatnya kecenderungan perusakan ekosistem hutan mangrove seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat lokal seperti, penebangan pohon mangrove yang dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga dan bara arang untuk diperdagangkan, tanpa memperhatikan daya dukung dan daya pulihnya, serta meningkatnya aktivitas pencari kepiting (*pasodok*) yang mencari

kepiting ke wilayah ekosistem mangrove juga memicu peningkatan kerusakan hutan mangrove dan memberikan kerugian kepada lingkungan sekitar karena dapat merusak ekosistem yang ada pada kawasan hutan mangrove tersebut

Upaya pelestarian kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan beberapa waktu lalu, telah menjadi perhatian oleh masyarakat Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan melakukan penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang rusak melalui swadaya masyarakat.

Masalah berikutnya adalah penebangan secara liar baik digunakan sebagai kayu bakar, atau dijadikan arang untuk dijual, perluasan areal tambak secara tidak terkendali, sehingga apabila hal ini tidak segera dihentikan, maka suatu saat kita tidak melihat lagi hutan mangrove di Kabupaten Sinjai dan hal ini merupakan bencana besar.

Berdasarkan kondisi hutan mangrove tersebut, perlu dilaksanakan suatu upaya rehabilitasi hutan mangrove oleh Pemerintah Daerah yang didukung dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan dalam rehabilitasi hutan mangrove tidak terlepas dari peran Pemerintah khususnya di daerah melalui instansi yang berwenang, lebih dominan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan hutan mangrove. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat diperlukan, agar

kelestarian ekosistem hutan mangrove dapat terjaga dan terpelihara. Strategi pengelolaan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat lokal dipandang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan satu arah yang hanya melibatkan pemerintah.

Dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan hutan mangrove, maka akan timbul rasa tanggung jawab di dalam diri mereka akan pentingnya fungsi hutan mangrove bagi daerah pesisir.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sosiologi lingkungan dan teori fungsional struktural, pertimbangan memilih pendekatan ini karena teori ini memusatkan penelitian atau penjelasan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Sosiologi lingkungan terdiri dari dua suku kata, yaitu *sosiologi* dan *lingkungan*. Oleh karena itu untuk lebih memahami paper ini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing sosiologi, lingkungan dan sosiologi lingkungan.

Menurut pendapat ahli sosiologi, *Max Weber* mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Sedangkan lingkungan, menurut UURI No.4 Tahun 1982 & UURI No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam buku sosiologi lingkungan yang kutip oleh Rachma K. Dwi Susilo, M.A. ( 2008 : 77-78) menyatakan bahwa hutan mangrove dibabat habis demi

ambisi membangun perumahan mewah, pusat industry dan pusat-pusat ekonomi. Akibatnya habitat-habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies ( biota) laut semakin sempit. Padahal, spesies-spesies yang hidup diudara dan darat amat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Akibatnya spesies-spesies tersebut mencari habitat baru yang menambah persoalan manusia.

Olehnya itu perlu kesadaran untuk menjaga hutan karena Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan. Pengelolaan hutan yang bersifat kompleks dengan multikomponen dan multiaspek di dalamnya, memerlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat tersebut dipandang sebagai bagian dari ekosistem hutan, sehingga tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pengelolaan hutan.

Teori fungsional struktural melihat suatu system sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (Ritzer, 2010: 21). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Focus utama dari berbagai pemikir teori fungsional structural adalah untuk mendefinisikan kegiatan dalam Pengelolaan hutan berdasarkan cakupan wilayah kawasan dan bukan kawasan. Pada keduanya dapat dijumpai empat komponen yang merupakan kesatuan ekosistem, yakni: flora, fauna, lingkungan, dan manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi interaksi antara keempat komponen. Mudah dipahami bilamana dalam interaksi tersebut timbul berbagai masalah yang membutuhkan pendekatan-pendekatan dalam merumuskan alternatif solusinya. Salah satu di

antara pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di sekitar hutan. Para penganut teori fungsional structural ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Singkatnya adalah masyarakat menurut kaca mata teori (fungsional) senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sosial

Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang teori Fungsionalisme Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat adalah Teori Fungsionalisme Struktural. Jika menurut Teori Fungsionalisme Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut Teori Konflik malah sebaliknya.

Menurut Dahrendorf (1990: 24) membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok

kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Singkatnya, Teori Konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan.

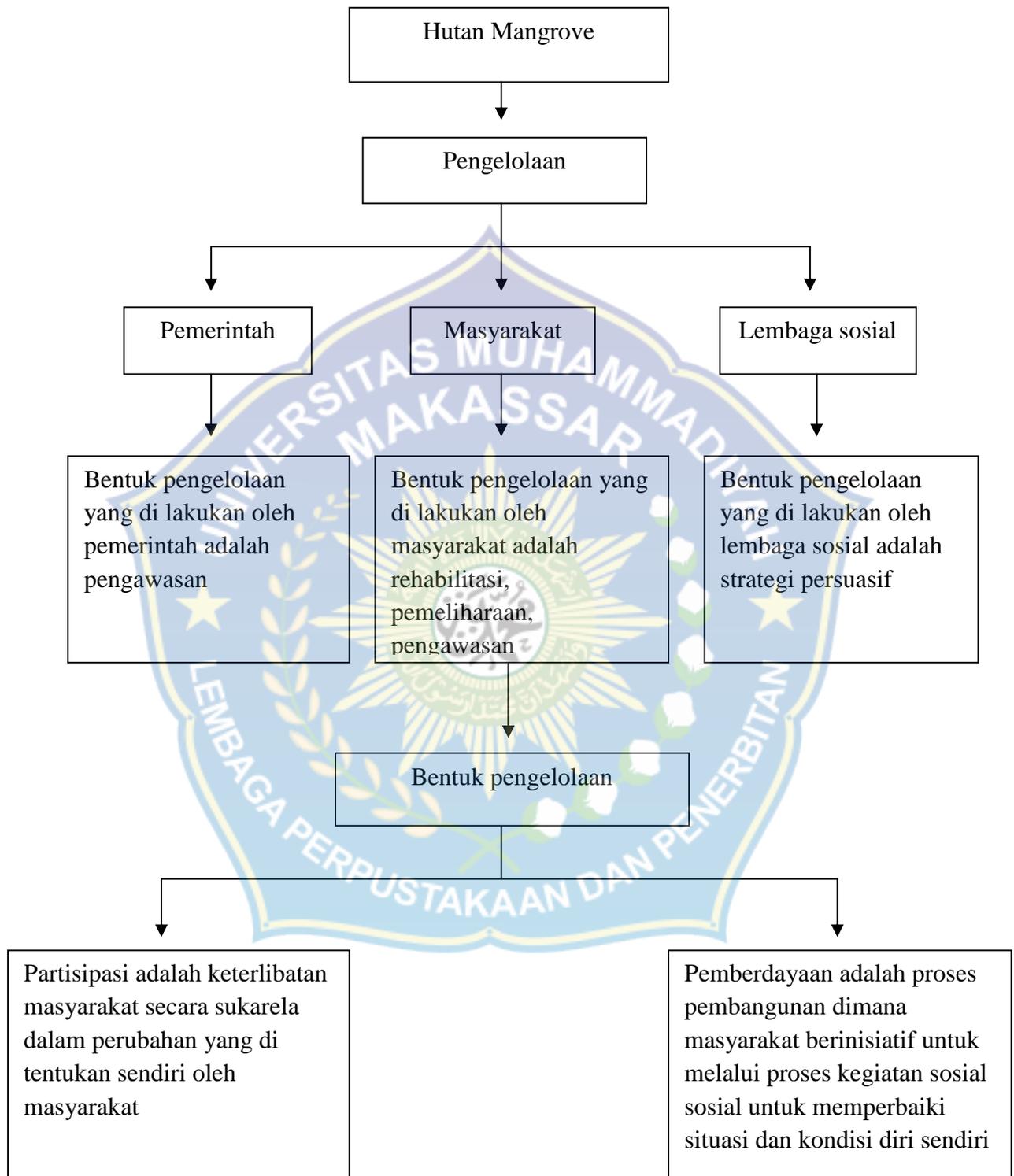
### **C. Kerangka Pikir**

Adapun Kerangka Pikir Mengenai Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke (Studi Kasus Masyarakat sekitar kec.sinjai timur kab.sinjai)

Dalam melakukan penelitian tentang "Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove" akan melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan kerangka pikir sebagai pedomannya, Hutan mangrove yang di kelolah oleh masyarakat sekitar, pemerintah dan lembaga sosial memiliki dua bentuk pengelolaan yaitu partisipasi dan pemberdayaan, di mana partisipasi yang di

maksud di sini adalah di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan, pemerintah dan lembaga sosial di dalam mengelola hutan mangrove tersebut.





## **BAB III**

### **JENIS PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif , Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motifasi tindakan dan lain lain “Levy J.Moleang, (2007:6 ) penelitian deskriptif terhadap kualitatif dalam hal ini mengadakan penelitian dengan mengadakan pendekatan pendekatan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke kec.sinjai timur kab.sinjai

Penelitian studi kasus ini dapat memilih tipe penelitiannya berdasarkan tujuan yakni studi kasus kolektif yang memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan suatu persoalan penting dari berbagai perspektif.

#### **B.Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai karena di lokasi tersebut terdapat hutan mangrove tongke tongke

### **C. Informan Penelitian**

Tehnik penentuan informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *porpusive sampling* atau *judgmentalsampling* yaitu penarikan informan secara purosif merupakan acara penarikan informan yang di lakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti:

Kriteria spesifik yang di terapkan peneliti:

1. Masyarakat yang ada di sinjai timur
2. Pemerintah yang ada di sinjai timur
3. Lembaga sosial yang ada di sinjai timur

### **D. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke, sementara yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah yang ada di desa tongke tongke

### **E.Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian adalah yang di gunakan dalam mengumpulkan data.Yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Sebagai insrtumen utama dalam penelitian ini maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai hasil penelitian ini seluruhnya di lakukan oleh peneliti,

untuk mendukung alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

#### **F. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara atau observasi
2. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari hasil telaah buku referensi dan dokumentasi

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang meliputi: Masyarakat yang ada di desa tongke tongke dan Pemerintah yang ada di desa tongke tongke yang akan memberikan pemahaman berdasarkan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, dan tanggapan atau pertanyaan pertanyaan yang di ajukan, selain itu di dukung oleh data lain yaitu dokumentasi serta referensi yang ada.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku dari berbagai gejala pada sasaran yang diteliti Faisal (Dalam Moleong 2005:174).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang di manfaatkan sebesar besarnya seperti yang di kemukakan oleh Guba dan Lincoln (Dalam Moleang 2005:174-175) yaitu: (1). Teknik pengambilan ini di dasarkan atas pengamatan secara langsung, (2). Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dari kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, (3). Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung di peroleh dari data.

## 2. Wawancara

Menurut Miles dan Huberman (Dalam Moleang 2005:186) wawancara adalah carapengumpulan data yang di lakukan secara informal yang dapat di laksanakan dalam waktu yang konteks yang di anggap tepat guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat di lakukan berkali kali sesuai dengan keperluan penelitian tentang kejelasan yang di jelajahi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data data, dokumen dokumen tertulis ataupun hasil gambar sumber.

## **H. Teknik Analisi Data**

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan sejumlah peneliti

kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara tersebut untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau konteks yang tak terekam dan peneliti lupa penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi pragmen pragmen tak berarti. Sehingga pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti harus langsung di ikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menyajikan yang selanjutnya.

Dari semua data serta informasi yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian tersebut akan di analisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi yang jelas dan mendalam sebagai metode penelitian studi kasus. Hasil dari gambaran informasi akan di interprestasikan sesuai dari hasil yang di lakukan.

Analisi data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit melakukan sistesi, menyusun kedalam pola memilih nama yang penting yang akan di pelajari dan membentuk kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### **I. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang di gunakan adalah triangulasi, menurut Sugiono (2013: 273-274) tringulasi (pengujian) kredabilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknin keabsahan data ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
- c. Triangulasi waktu untuk pengujian kredibilitas data dapat di lakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



## BAB IV

### GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi wilayah penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten sinjai merupakan daerah pesisir yang berada di pesisir timur sulawesi selatan yang secara administratif terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, 13 Kelurahan dan 67 Desa. Letaknya berjarak sekitar 223 km dari arah selatan ke arah utara, secara astronomis berada pada posisi  $5^{\circ}19'30''$  sampai  $5^{\circ}36'47''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}48'30''$  sampai  $120^{\circ}0'0''$  bujur timur.

Ekosistem mangrove yang menjadi pokok perhatian dalam *paper* ini adalah kawasan hutan mangrove di daerah Tongke-tongke yang berada di pulau Sulawesi. Tongke-tongke adalah sebuah desa yang berada pada bagian Barat teluk Bone. Lokasi ini dilalui oleh dua buah sungai yaitu sungai Baringeng dan sungai Tui, yang membawa sedimen dari gunung Bawakaraeng hingga ke pesisir pantai, sehingga tanah yang berada pada kawasan tersebut merupakan campuran antara pasir dan lumpur sungai.

Secara administratif dusun Tongke-tongke merupakan bagian dari sebuah desa Samaritang yang berada pada kecamatan Sinjai Timur. kabupaten Sinjai yang berjarak sekitar 20 km dari Balanipa (ibukota kabupaten Sinjai) yang dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan

bermotor dalam waktu 30 menit. Daerah yang memiliki luas 2,25 km<sup>2</sup>, secara umum merupakan kawasan konservasi hutan Mangrove dan daerah pertanian.

Tongke-tongke mempunyai populasi penduduk sekitar 1.809 orang yang dapat dibagi atas 2 (dua) golongan, golongan pertama adalah penduduk lokal yang kebanyakan adalah petani sawah dan palawija, sedangkan golongan kedua adalah pendatang yang umumnya adalah nelayan.

Sebagian besar pendatang berasal dari daerah Mare kabupaten Bone yang memiliki keahlian dalam penangkapan ikan tuna dan pencarian terumbu karang (*coral reef*) yang oleh masyarakat ini disebut dengan “*taka-taka*”. Pendatang inilah yang kemudian mengolah kawasan hutan mangrove menjadi empang-empang. Selain itu, mereka juga menanam kembali kawasan mangrove tersebut.

Wilayah kabupaten sinjai di bagi dalam Wilayah Kabupaten Sinjai dibagi dalam 9 Kecamatan yaitu, Kecamatan Sinjai utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan. Luas wilayahnya berdasarkan data yang telah ada sekitar 819,96 km<sup>2</sup> (81,996 ha) dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatsan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Ekosistem mangrove yang menjadi pokok perhatian dalam *paper* ini adalah kawasan hutan mangrove di daerah Tongke-tongke yang berada di pulau Sulawesi. Tongke-tongke adalah sebuah desa yang berada pada bagian Barat teluk Bone. Lokasi ini dilalui oleh dua buah sungai yaitu sungai Baringeng dan sungai Tui, yang membawa sedimen dari gunung Bawakaraeng hingga ke pesisir pantai, sehingga tanah yang berada pada kawasan tersebut merupakan campuran antara pasir dan lumpur sungai.

Secara administratif dusun Tongke-tongke merupakan bagian dari sebuah desa Samaritang yang berada pada kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai yang berjarak sekitar 20 km dari Balanipa (ibukota kabupaten Sinjai) yang dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 30 menit. Daerah yang memiliki luas 2,25 km<sup>2</sup>, secara umum merupakan kawasan konservasi hutan Mangrove dan daerah pertanian.

Tongke-tongke mempunyai populasi penduduk sekitar 1.809 orang yang dapat dibagi atas 2 (dua) golongan, golongan pertama adalah penduduk lokal yang kebanyakan adalah petani sawah dan palawija, sedangkan golongan kedua adalah pendatang yang umumnya adalah nelayan.

Sebagian besar pendatang berasal dari daerah Mare kabupaten Bone yang memiliki keahlian dalam penangkapan ikan tuna dan pencarian terumbu karang (*coral reef*) yang oleh masyarakat ini disebut dengan "*taka-taka*". Pendatang inilah yang kemudian mengolah kawasan hutan mangrove menjadi

empang empang empang selain itu mereka juga menanam kembali kawasan mangrove tersebut.

Penanaman berbagai jenis tanaman juga banyak di jumpai di sekitar rumah rumah penduduk seperti kelapa, pisang, mangga, pepaya dan bibit mangrove keberadaan tanaman ini menjadikan halaman rumah penduduk menjadi asri dan nyaman selain menanam berbagai jenis tumbuhan para penduduk pun memelihara berbagai jenis hewan seperti ayam, itik dan ikan.

Pola pemukiman penduduk kecamatan tongke tongke merupakan perkampungan dengan kumpulan bangunan tempat tinggal yang umumnya berjajar mengikuti memanjang mengikuti pinggiran jalan dan di atur secara berkelompok dalam posisi saling berhadapan satu sama lain demikian pula daerah empang penduduk berada di bagian belakang rumah pemukiman penduduk mulanya bentuk rumah penduduk berupa rumah panggung dinding dan lantanya pun terbuat dari papan

Keadaan di desa tongke tongke merupakan daerah yang sangat asri di desa ini masih sangat tenang selain karena belum banyak kendaraan umum yang lalu lalang sehingga jauh dari kebisingan seperti kota selain itu di desa tongke tongke merupakan daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan petani mangrove yang setiap hari hampir sebagian waktunya mereka habiskan di sawah di mana petani mangrove tersebut berangkat ke sawahnya pada pagi hari dan pulang sebelum Duhur dan lanjut lagi sampai matahari tenggelam.

## **2. Batas wilayah tempat penelitian**

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bone
- b. Sebelah timur berbatasan dengan teluk bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bulukumba
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten gowa

## **3. Sejarah kabupaten sinjai**

Sinjai adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Sinjai berasal dari Kata Sijai' (Bahasa Bugis) artinya sama jahitannya. Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti dengan ungkapannya "PASIIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO" artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA. Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai pada masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulu-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang.

Agresi Belanda tahun 1559 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa'na Manggarabombang atau perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan belanda. Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba menentang keras upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan Bulu-bulu untuk melakukan peran terhadap kerajaan Gowa.

Peristiwa ini terjadi tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh pada PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda VAN DER CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk I CELLA ARUNG ( PUANG CELLA MATA) Bulu-Bulu XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda Mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolah dengan tegas. Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulu-

bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulu-bulo, Manipi dan Turungeng. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditatah sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959.

Kabupaten Sinjai berdasarkan penelusuran sejarah, dimulai dari pemukiman pertama di WAWO BULU Manipi Kecamatan Sinjai Barat di sebelah timur Malino dipimpin oleh orang yang digelar PUATTA TIMPAE' TANA atau TO PASAJA yaitu Arung Manurung Tanralili. Keturunan Arung Tanralili, salah seorang diantaranya adalah wanita yang kemudian puteri Tanralili inilah yang mengembangkan wilayah Wawo Bulu menjadi Kerajaan TURUNGENG. Raja wanita tersebut diperisterikan oleh putera Raja Tallo yang kemudian salah seorang turunannya adalah wanita kawin dengan salah seorang putera Raja Bone. Dari hasil perkawinan itulah yang kemudian melahirkan enam orang putera dan satu orang puteri. Akan tetapi puterinyalah yang menggantikan ibunya menduduki tahta kerajaan di Turungeng. Adapun keenam puteranya ditebarkan ke wilayah lain sehingga ada yang bermukim di Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka, Bala Suka dan masing-masing berusaha membentuk wilayah kekuasaan. Dari keturunan Puatta Timpae' Tana atau To Pasaja inilah yang berhasil membentuk kerajaan dalam wilayah dekat pantai yang dikenal dengan kerajaan Tondong, Bulu-Bulo,

dan Lamatti. Untuk memelihara hubungan dan keutuhan wilayah kerajaan yang bersumber dari satu keturunan, maka muncullah gagasan dari I Topacebba (anak dari La Padenring) yang digelar Lamassiajingeng (Raja Lamatti ke-X) berupaya mempererat hubungan Lamatti dengan Bulu-Bulo atas dasar semboyan “ PASIJAI SINGKERUNNA LAMATTI BULO-BULO “ artinya satukan keyakinan / kekuatan Lamatti dengan Bulu-Bulo. Penggagas dalam memelihara persatuan Lamatti dan Bulu-Bulo saat meninggalnya digelar “ PUATTA MATINROE’ RISIJAINNA “. Sinjai dalam ungkapan bahasa Bugis bermakna satu jahitan. Sinjai artinya bersatu dalam jahitan. Dari istilah sijai menjadi sinjai, merupakan suatu simbol dalam mempererat hubungan kekeluargaan, menurut bahasa Bugis. Dari pertumbuhan dan perkembangan kerajaan yang ada, muncul pemikiran baru tentang perlunya memperkuat persatuan dan kesatuan dalam memelihara dan melindungi kerajaan yang ada, maka dibentuklah kelompok gabungan kerajaan yang berbentuk vederasi yang dikenal dengan:

1. TELLU LIMPOE, merupakan persekutuan berbagai kerajaan yang berdekatan dengan pantai yaitu Tondong, Bulu Bulu dan Lamatti
2. PITU LIMPOE, merupakan persekutuan kerajaan yang berlokasi di daerah dataran tinggi yaitu kerajaan turungeng, Mnimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka, Balassuka.

Federasi kerajaan tellu limpoe dan pitu limpoe merupakan dua kekuatan yang akan membendung arus ekspansi dari barat dan selatan juga

merupakan kekuatan pertahanan untuk membendung arus ekspansi dari utara dan penyelamatan garis pantai.

#### **4. Wilayah kabupaten sinjai**

- a. Kecamatan sinjai utara, 6 kelurahan
- b. Kecamatan sinjai timur, 1 kelurahan 12 desa
- c. Kecamatan sinjai tengah, 1 kelurahan 10 desa
- d. Kecamatan sinjai barat, 1 kelurahan 8 desa
- e. Kecamatan sinjai selatan, 1 kelurahan 10 desa
- f. Kecamatan sinjai borong, 1 kelurahan 10 desa
- g. Kecamatan bulupoddo, 7 desa
- h. Kecamatan tellu limpoe, 1 kelurahan 7 desa
- i. Kecamatan pulau sembilan, 4 desa yang merupakan kepulauan

#### **5. Bupati sinjai dari masa ke masa**

- a. Andi abdul latif 1960-1963
- b. Andi Azikin 1963-1967
- c. Drs. H. M. Nur Tahir 1967-1971
- d. Drs. H. A. Bintang. M 1971-1983
- e. H. A. Arifuddin Mattotorang SH. 1983-1993
- f. H. Moh. Roem SH, M.Si 1993-2003
- g. Andi Ridiyanto Asapa. SH, LLM 2003-2013
- h. H. Sabirin Yahya. S.Sos 2013-2017



**BAB V**

**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**

**PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TONGKE-TONGKE**

**KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**

**A. Bentuk partisipasi masyarakat**

Hutan mangrove merupakan sumber daya yang sangat penting bagi wilayah pesisir Tongke-Tongke dan erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat sekitar yang sebagian besar profesi sebagai petani tambak dan nelayan. Areal mangrove di Tongke-Tongke seluas 1.157 Hatelah mengalami berbagai perubahan fungsi, baik sebagai pariwisata, lahan tambak maupun jenis pengguna lain yang mengakibatkan pengurangan areal mangrove. Rusaknya hutan mangrove ini memerlukan sebuah bentuk rehabilitasi, pemeliharaan maupun pengawasan terhadap hutan mangrove tersebut.

Ada 4 family dan 5 Spesies mangrove, yaitu *Family Rhizophoraceae*, *Avicenniaceae*, *Sonneratiaceae* dan *Palme*. Sedangkan Spesies yang ada di lokasi areal mangrove tersebut, terdiri dari *Rhizophoraceae stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia alba*, *Avicennia alba* dan *Nhaya fruticans*. Jenis family atau spesies yang paling dominan di gunakan pada proses penanaman di kelurahan Tongke-Tongke adalah *Rhizophora mucronata* dan *Avicennia*.

Hutan mangrove di Kabupaten Sinjai berkembang dari partisipasi masyarakat. Masyarakat pesisir Kabupaten Sinjai melakukan pengembangan

dan pengelolaan hutan mangrove dari tahun 1980 sampai sekarang. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tahun 2011, Luas hutan mangrove di Kabupaten Sinjai mencapai 1.157 Ha.

Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai membawa berbagai pihak (Instansi/lembaga pemerintah dan swasta, akademisi, dll), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berkunjung ke Sinjai. Tujuan kunjungan berbagai pihak tersebut untuk melihat dan menggali informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai terjadi karena kemampuannya mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk menangani masalah yang ada disekitarnya. Saat rumah dan tambak mereka rusak akibat abrasi, terjangan ombak besar dan angin kencang, mereka mengambil keputusan untuk menanam bakau (mangrove) di pesisir pantai untuk tujuan perlindungan.

Hutan mangrove di Kabupaten Sinjai berkembang dari partisipasi masyarakat. Masyarakat pesisir Kabupaten Sinjai melakukan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove dari tahun 1980 sampai sekarang. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tahun 2011, Luas hutan mangrove di Kabupaten Sinjai mencapai 1.157 Ha.

Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai membawa berbagai pihak (Instansi/lembaga pemerintah dan

swasta, akademisi, dll), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berkunjung ke Sinjai. Tujuan kunjungan berbagai pihak tersebut untuk melihat dan menggali informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai terjadi karena kemampuannya mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk menangani masalah yang ada disekitarnya. Saat rumah dan tambak mereka rusak akibat abrasi, terjangan ombak besar dan angin kencang, mereka mengambil keputusan untuk menanam bakau (mangrove) di pesisir pantai untuk tujuan perlindungan.

“...Isbandi dan dkk(2007 :12) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah...”

1. Apa sajakah kendala yang di hadapi saat saat menanam pohon mangrove?

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti dengan responden yakni puang Ahmad selaku responden dan beliau merupakan salah satu petani mangrove yang ada di desa tongke tongke beliau menjelaskan bahwa:

*“Penanaman bibit mangrove yang pernah di lakukan di Tongke-Tongke tidak menemui banyak kendala, namun setelah proses tersebut berlalu terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh tanaman mangrove tersebut, antara lain adanya gangguan hama berupa lumut yang menempel pada batang tanaman mangrove yang menyebabkan tumbuhan tanaman mangrove menjadi lambat akibat tidak munculnya akar baru yang berfungsi menyerap nutrisi dan menjaga tumbuhan mangrove dari hempasan ombak serta adanya kapal nelayan yang berada di sekitar areal mangrove yang terbawa arus ke areal yang telah di tanami bibit, sehingga menyebabkan tanaman baru tersebut*

*mati tertindih badan kapal tersebut...”(wawancara Puang Ahmad tanggal 04 September 2017).*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tanaman mangrove tersebut tidak terjaga kelestariannya karena adanya beberapa kapal nelayan yang berada di kawasan hutan mangrove sehingga membuat tanaman mangrove tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik karena mati tertindih badan kapal tersebut, sebaiknya para masyarakat tersebut di berikan pengertian oleh pemerintah agar tidak merusak tumbuhan mangrove tersebut, karena tumbuhan mangrove yang ada di tongke tongke merupakan aset yang sangat di jaga kelestariannya oleh pemerintah karna hutan mangrove yang ada di tongke tongke merupakan laboratorium bakau yang ada di sulawesi selatan.

2. Keuntungan apa sajakah yang di rasakan oleh masyarakat sekitar setelah adanya hutan mangrove?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yakni ibu subaedah selaku responden beliau merupakan salah satu masyarakat yang ada di desa tongke tongke.

*“Dengan adanya hutan mangrove tersebut yang ada di kampung kami dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar karena mereka dapat memanfaatkan kayu yang telah kering untuk dapat di jual dan dapat pula dapat di jadikan sebagai bahan bakar untuk memasak, salah satu keuntungannya juga adalah mereka dapat menjual makanan di tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian keluarga mereka untuk sehari hari”(Wawancara dengan SB pada tanggal 04 september 2017)*

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan adanya hutan mangrove di desa tongke tongke dapat memberikan keuntungan lebih kepada masyarakat sekitar karna mereka bisa memanfaatkan kayu yang telah kering dapat di jadikan sebagai bahan bakar untuk memasak keperluan sehari hari

3. Bagaimana cara pengelolaan hutan mangrove yang di lakukan oleh masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yakni puang Bahar selaku responden beliau merupakan salah satu petani mangrove:

*“penanaman mangrove dilakukan di berbagai lokasi pesisir Tongke-Tongke, terutama disekitar areal tambak, dan bekas habitat mangrove yang telah rusak baik akibat aktifitas manusianya sendiri maupun dari pihak luar. Rehabilitasi ini dilakukan untuk menghijaukan kembali hutan mangrove yang telah rusak dan memperkecil instrusi air laut kedarat serta memperkecil terjadinya abrasi pantai...”( wawancara Puang Bahar pada tanggal 04 September 2017).*

Kutipan wawancara di atas jelas bahwa penanaman mangrove di lakukan untuk menghijaukan kembali hutan mangrove yang telah rusak, maka dari itu ada beberapa tahap proses rehabilitasi di antaranya:

1. Kegiatan pembibitan yang di lakukan di tongke tongke terdiri dari beberapa tahapan antara lain :
  - a. Persiapan yang terdiri dari pembersihan lokasi, dan pengiisian tanah ke playbang
  - b. Pengambilan propogaul di lokasi pohon indukan, pengambilan benih di lakukan pada pohon induk yang sudah di identifikasi

dimana mempunyai diameter di atas rata rata berbatang lurus sehat dan berumur tujuh tahun ke atas

- c. Pengisian polybang dengan propagul yaitu benih yang telah di ambil dari pohon induk kemudian di masukkan ke polybang dengan ukuran 11x7 cm dengan ketebalan 0.03 cm setelah itu benih di masukkan ke dalam bedagang yang berukuran 6x1 m.
- d. Monitoring secara berkala untuk mengontrol kondisi air, kondisi bibit dan penggantian bibit rusak.

4. Apakah manfaat yang anda rasakan setelah adanya hutan mangrove?

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa tongke tongke bahwa:

*“ dengan adanya hutan mangrove tersebut sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dan manfaatnya masih di rasakan sampai sekarang, Bakau awalnya di tanam di belakang rumah penduduk untuk pelindung dari gemparan ombak dan angin kencang karna sebelum di lakukan penanaman bakau ombak dan angin kencang sangat memberikan keresan kepada warga mayarakat sekitar yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut” (Wawancara dengan Imran tanggal 04 september 2017)*

Pada tahun 1940 hutan mangrove yang di tanam masyarakat dan yang tumbuh alami. Tidak lama kemudian hutan mangrove telah mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai penyangga kehidupan pesisir. Kerusakan terjadi karena abrasi pantai. Pada tahun 1980 selama kurang lebih 40 tahun tingkat kerusakn hutan mangrove terus meningkat utamanya di kelurahan Tongke-Tongke .Dan pada 1990 keberhasilan

masyarakat sinjai khususnya di kelurahan Tongke-Tongke telah membangun kembali hutan mangrove secara swadaya dan membawa perubahan yang di rasakan manfaatnya sampai sekarang.

Hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pengembangan pariwisata hutan mangrove tongke tongke kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai jika di kaitkan dengan teori sosiologi lingkungan dan structural fungsional karena teori ini memusatkan penelitian atau penjelasan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Sosiologi lingkungan terdiri dari dua suku kata, yaitu *sosiologi* dan *lingkungan*. Oleh karena itu untuk lebih memahami paper ini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing sosiologi, lingkungan dan sosiologi lingkungan.

Menurut pendapat ahli sosiologi, *Max Weber* mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Sedangkan lingkungan, menurut UURI No.4 Tahun 1982 & UURI No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam buku sosiologi lingkungan yang kutip oleh Rachma K. Dwi Susilo, M.A. ( 2008 : 77-78) menyatakan bahwa hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat industry dan pusat-

pusat ekonomi. Akibatnya habitat-habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies ( biota) laut semakin sempit. Padahal, spesies-spesies yang hidup diudara dan darat amat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Akibatnya spesies-spesies tersebut mencari habitat baru yang menambah persoalan manusia.

Olehnya itu perlu kesadaran untuk menjaga hutan karena Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan. Pengelolaan hutan yang bersifat kompleks dengan multikomponen dan multiaspek di dalamnya, memerlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat tersebut dipandang sebagai bagian dari ekosistem hutan, sehingga tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pengelolaan hutan.

Teori fungsional struktural melihat suatu system sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (Ritzer, 2010: 21). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Focus utama dari berbagai pemikir teori fungsional structural adalah untuk mendefinisikan kegiatan dalam Pengelolaan hutan berdasarkan cakupan wilayah kawasan dan bukan kawasan. Pada keduanya dapat dijumpai empat komponen yang merupakan kesatuan ekosistem, yakni: flora, fauna, lingkungan, dan manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi interaksi antara keempat komponen. Mudah dipahami bilamana dalam interaksi tersebut timbul berbagai masalah

yang membutuhkan pendekatan-pendekatan dalam merumuskan alternatif solusinya. Salah satu di antara pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di sekitar hutan. Para penganut teori fungsional structural ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

fakta sosial yang teramati sehingga pada dasarnya begitu kompleks. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan berbagai lapisan sosial dalam masyarakat membutuhkan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada fakta yang teramati dan menggali fakta dibalik fakta yang teramati. Dalam hal ini tentunya fakta-fakta yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, Penelitian ini di laksanakan di kabupaten Sinjai. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakatnya yang masih mengelola hutan mangrove tersebut.

## **B. Implikasi partisipasi**

### **a. Pemberdayaan**

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah peisisir dan lautan selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota

perairan, pemberdayaan kawasan hutan mangrove yang tidak terlepas dari kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah karena tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah sehingga Suatu pembangunan berbasis masyarakat dapat terbentuk, jika ada suatu kelompok berkolaborasi, karena mereka sadar tidak dapat mengerjakan suatu tugas sendiri-sendiri dan tidak dapat mencapai tujuan secara individual baik karena sifat dari tugas atau tujuan itu sendiri, maupun karena keterbatasan sumber-sumber. Kebersamaan dan kesamaan dalam perhatian, kepedulian, biasanya membuat masyarakat bersatu. Jika kebersamaan itu melembaga, dan menimbulkan kesetiakawanan, rasa saling percaya, terciptanya aturan-aturan main, maka inilah dasar dari terbentuknya basis masyarakat. Sehingga strategi yang tepat perlu dilakukan untuk menangani isu-isu yang mempengaruhi lingkungan pesisir melalui partisipasi aktif dan bentuk nyata dari masyarakat pesisir itu sendiri. Adanya partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Banyak program dan kegiatan pengelolaan yang kurang berhasil dikarenakan pelaksanaan program yang gagal melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal program.

Pemberdayaan pariwisata mangrove pada dasarnya adalah upaya melibatkan masyarakat agar secara sadar dan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan mangrove. Keterlibatan dapat terwujud apabila seseorang merasa bahwa keikutsertanya dapat

memberikan manfaat bagi dirinya, dimana manfaat tersebut tidak hanya dalam bentuk fungsi hutan mangrove yang sifatnya dirasakan dalam jangka pendek. Berdasarkan hasil analisis faktor partisipasi dan pengelolaan hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan sinjai timur.

Di bagian timur laut kabupaten sinjai jejeran dan rimbunan hutan bakau yang tertera alami, pesisir laut tongke tongke menampilkan keindahan panorama alam serta adanya kelelawar yang bergelantungan pada setiap bulan april sampai bulan september mengikuti musim adaptasi lingkungan spesies binatang tersebut, kawasan mangrove ini di jadikan sebagai kunjungan wisatawan yang terbebukti banyak di minati oleh wisatawan mancanegara.

Desa tongke tongke yang di kenal dengan hutan bakaunya lebih di kenal dengan laboratorium bakau sulawasi selatan yang dikembangkan dengan swadaya dan budidaya masyarakat secara murni sebuah jalan kayu yang telah permanen serta villa terapung dalam kawasan yang telah menjadi momok utama dalam pengembangan kepariwisataan sebagai animo masyarakat melalui pemerintah untuk bersinergi dalam mengelola aset wisata tersebut

Di samping itu masyarakat setempat dan pemerintah telah menyediakan sarana transportasi laut yang bersandar di pesisir hutan bakau yang mana di persiapan bagi wiatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk lebih menikmati keindahan hutan bakau dari

luar dan biota laut serta keanekaragaman hayati yang menyatu dengan alam hutan bakau dari sektor perkebunan dan perikanan juga telah memfasilitasi sebuah sanggar tani yang di jadikan sebagai pusat pelatihan bakau dan aktifitas para sanggar tani wanita yang lebih berorientasi pada pemeliharaan bakau.

Potensi yang terhampar di hadapan kita adalah sebuah nilai yang tertinggi untuk dikelola pemerintah dan masyarakat telah bersinergi untuk mengembangkan kawasan wisata tongke tongke secara berkelanjutan sisa waktu menunggu investasi untuk melanjutkan dan mengembangkan untuk kedepannya sehingga kawasan wisata tongke tongke semakin banyak di minati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, upaya pelestarian hidup hutan bakau yang selama ini di jadikan sebagai tumpuan masyarakat setempat untuk melangsungkan proses dari rantai biota laut sehingga perkembangan tambak mereka pun meningkat namun dengan adanya sektor kepariwisataan telah mampu menambah ekonomi kerakyatan bagi masyarakat setempat dan menjadikan suatu bahan ekspos kedepan dengan potensi wilayah mereka yang eksotis di bandingkan dengan potensi daerah lain.

**BAB VI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MELESTARIKAN HUTAN  
MANGROVE TONGKE TONGKE DI KECAMATAN SINJAI  
TIMUR KABUPATEN SINJAI**

**A. Peran pemerintah dalam melestarikan hutan mangrove**

Hutan mangrove di Kabupaten Sinjai berkembang dari peran pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove dari tahun 1980 sampai sekarang. Data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tahun 2011, Luas hutan mangrove di Kabupaten Sinjai mencapai 1.157 Ha.

Keberhasilan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai membawa berbagai pihak (Instansi/lembaga pemerintah dan swasta, akademisi, dll), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berkunjung ke Sinjai. Tujuan kunjungan berbagai pihak tersebut untuk melihat dan menggali informasi tentang bagaimana peran pemerintah di dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove.

Pemerintah di sini sangat berperan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai bahwa penanaman hutan mangrove selaku pihak pemerintah dinas perkebunan dan kehutanan yaitu memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa bibit mangrove sebanyak 50.000 batang bibit pada tahun 2011, dengan

memberikan fasilitas bibit mangrove kepada masyarakat dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan hutan mangrove selain itu menjadi suatu kerja sama oleh pemerintah dinas perkebunan dan kehutanan dengan kelompok masyarakat terjalannya suatu kerja sama memberikan dampak positif terhadap pelestarian hutan mangrove yang ada di desa tongke tongke kecamatan sinjai timur.

Di samping itu masyarakat setempat dan pemerintah telah menyediakan sarana transportasi laut yang bersandar di pesisir hutan bakau yang mana di persiapkan bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk lebih menikmati keindahan hutan bakau dari luar dan biota laut serta keanekaragaman hayati yang menyatu dengan alam hutan bakau dari sektor perkebunan dan perikanan juga telah memfasilitasi sebuah sanggar tani yang di jadikan sebagai pusat pelatihan bakau dan aktifitas para sanggar tani wanita yang lebih berorientasi pada pemeliharaan bakau.

Keberhasilan pengelolaan hutan mangrove tidak terlepas dari partisipasi/peran serta pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu berperan aktif dalam pengembangan hutan mangrove. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 06 ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup”

Tongke tongke adalah simbol sukses rehabilitasi hutan bakau hutan mangrove tongke tongke bukanlah hutan baru melainkan telah tumbuh sepuluh tahun yang lalu melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah, hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan hutan mangrove. Pemerintah daerah dengan dukungan masyarakatnya mampu menciptakan potensi alam jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Masyarakat setempat mendapa dana segar dari pemerintah daerah untuk pemeliharaan hutan mangrove pada tahun 1984 melalui kelompok swadaya masyarakat –kelompok pelestarian sumber daya alam aku cinta indonesia (KPSDA-ACI) desa tongke tongke yang di dirikan warga setempat khusus untuk menangani penanaman dan pelestarian hutan bakau di sepanjang pesisir desa penanaman mangrove di galakkan.

Keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori seperti teori sosiologi lingkungan dan teori structural fungsional Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sosiologi lingkungan dan teori fungsional struktural, pertimbangan memilih pendekatan ini karena teori ini memusatkan penelitian atau penjelasan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Sosiologi lingkungan terdiri dari dua suku kata, yaitu *sosiologi* dan *lingkungan*. Oleh karena itu untuk lebih memahami paper ini akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing sosiologi, lingkungan dan sosiologi lingkungan.

Menurut pendapat ahli sosiologi, *Max Weber* mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Sedangkan lingkungan, menurut UURI No.4 Tahun 1982 & UURI No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam buku sosiologi lingkungan yang kutip oleh Rachma K. Dwi Susilo, M.A. (2008 : 77-78) menyatakan bahwa hutan mangrove dibabat habis demi ambisi membangun perumahan mewah, pusat industry dan pusat-pusat ekonomi. Akibatnya habitat-habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies ( biota) laut semakin sempit. Padahal, spesies-spesies yang hidup diudara dan darat amat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Akibatnya spesies-spesies tersebut mencari habitat baru yang menambah persoalan manusia.

Olehnya itu perlu kesadaran untuk menjaga hutan karena Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan. Pengelolaan hutan yang bersifat kompleks dengan multikomponen dan multiaspek di dalamnya, memerlukan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologi yang menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Masyarakat tersebut dipandang

sebagai bagian dari ekosistem hutan, sehingga tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pengelolaan hutan.

1. Apakah keuntungan daerah dengan adanya hutan mangrove yang ada di tongke tongke kecamatan sinjai timur?

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Sekertaris camat yang ada di sinjai timur bernama Sahrul Paesa mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya hutan mangrove yang ada di desa tongke tongke kabupaten sinjai memberikan keuntungan besar kepada daerah karena hutan mangrove yang ada di sinjai terkenal sebagai laboratorium mangrove sulawesi selatan, nah di wilayah ini juga terkenal di kalangan peneliti internasional sebagai salah satu pusat pengembangan hutan bakau yang ada di indonesia maka tak heran kawasan hutan bakau tongke tongke menjadi salah satu kawasan studi banding untuk pengembangan tanaman bakau bagi lembaga pengembangan kawasan bakau didunia. salah satu keuntungannya juga yaitu sinjai semakin terkenal atau terekspos karna banyaknya wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara yang berkunjung ke kawasan wisata hutan mangrove tongke tongke” (Wawancara dengan SP tanggal, 04 September 2017)*

Hasil wawancara di atas dengan informan dapat di simpulkan bahwa dengan adanya hutan mangrove tongke tongke tersebut memberikan keuntungan kepada daerah karena lebih terekspos dan terkenal sebagai salah satu laboratorium mangrove yang ada di sulawesi selatan dan juga terkenal sebagai kawasan studi banding untuk pengembangan tanaman bakau bagi lembaga pengembangan kawasan bakau di dunia.

2. Bagaimana sumbangsi pemerintah di dalam pengelolaan hutan mangrove?

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan camat sinjai timur bernama Tamzil Binawan, mengatakan bahwa:

*“Menghimbau masyarakat agar melakukan penanaman terus menerus karena pemerintah dinas perkebunan dan kehutanan telah memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa bibit mangrove sebanyak 50.000 batang bibit pada tahun 2011, nah untuk itu di harapkan kepada masyarakat agar menjaga dan memelihara mangrove dengan baik agar pemukiman warga yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut dapat terlindungi dari abrasi dan angin kencang, dengan adanya himbauan pemerintah setempat masyarakat melakukan penanaman secara swadaya dan membawa perubahan yang sangat di rasakan manfaatnya seperti pemukiman warga yang telah bebas dari genangan air pasang dan genpuran ombak yang besar tidak terjadi lagi pengikisan pantai sehingga ekosistem mangrove dapat terjamin” (Wawancara dengan TB pada tanggal 04 september 2017)*

Hasil wawancara di atas dengan informan dapat di simpulkan bahwa pemerintah di sini sangat berperan penting di dalam melestarikan hutan mangrove yang di desa tongke tongke karena mereka terus menghimbau kepada masyarakat agar terus menerus melakukan penanaman mangrove.

3. Bagaimanakah cara yang di lakukan pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan mangrove?

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di kantor kecamatan sinjai timur bernama nurfadilla

*“Dalam rehabilitasi hutan mangrove yang kami lakukan selaku pemerintah kami memberikan fasilitas berupa bantuan*

*bibit, biaya perawatan dan upah tanaman yang di lakukan masyarakat di dalam merehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak”(Wawancara dengan NF pada tanggal 04 september 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada informan mengenai hal rehabilitasi hutan mangrove tahun 2004 pihak pemerintah memberikan fasilitas berupa bantuan bibit rehabilitasi seluas 25 ha dan bibit yang di berikan sebanyak 5000 batang bibit/hektar biaya perawatan dan upah penanaman yang di lakukan masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove yang sebaiknya, dengan memberikannya bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terjung langsung dan erperan sepenuhnya dalam pengelolaah hutan mangrove.

4. Bagaimanakah bentuk konservasi hutan mangrove yang di lakukan oleh pemerintah?

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada salah satu pegawai yang ada di kantor kecamatan sinjai timur bernama Musdalifah?

*“dalam bentuk konservasi pemerintah melarang masyarakat agar tidak melakukan menebanga hutan mangrove karena pelestariannya yang harus kita jaga”(Wawancara dengan MD tanggal 04 september 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak pemerintah bahwa dalam bentuk konservasi pemerintah melarang masyarakat agar tidak melakukan penebangan hutan mangrove karena pelestariannya yang kita harus jaga, dengan melakukan

konservasi hutan mangrove ekosistem hutan mangrove akan terjaga kelestariannya, dalam himbauan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah memberikan pengaruh besar dalam menunjang dan melestarikan ekosistem mangrove.

5. Sejak kapan hutan mangrove ada di sinjai?

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh H. Abdul salam Dg.Bali beliau merupakan anggota DPRD yang ada di sinjai?

*Hutan mangrove ada di sinjai berpuluh puluh tahun yang lalu sejak tahun 1930 mangrove yang ada di kabupaten sinjai tumbuh alami seperti Avicenia sp niva ppructicans dan rhizopora spdengan jumlah yang sangat sedikit upaya penanaman mangrove di mulai dari era ini, sejak tahun 1890, tingkat kerusakan mangrove terus meningkat utamanya yang ada di tongke tongke, pada tahun 1985, kembali warga masyarakat tongke tongke bermusyawarah untuk melakukan penanaman mangrove, pada tahun 1990an keberhasilan masyarakat sinjai dalam pembangunan hutan hutan mangrove secara swadaya membawa perubahan yang sangat di rasakan manfaatnya pada tahun 2003 hutan luas mangrove sinjai mencapai 786 Ha, tahun 2005 mencapai 843 Ha,2013 sampai sekarang mencapai 1,157 Ha”(wawancara dengan AB tanggal 04 september 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut di atas dengan informan dapat di simpulkan bahwa hutan mangrove yang ada di sinjai telah tumbuh dari berpuluh puluh tahun yang lalu dengan adanya kesadaran dari masyarakat setempat yang menanam bakau, dari tahun ke tahun pun luas hutan mangrove yang ada di sinjai semakin meningkat buktinya saja sejak tahun sejak tahun 2003 hutan mangrove yang yang ada di sinjai cuman 786 tetapi dari tahun ke

tahun kini luas hutan mangrove yang ada di tongke tongke sinjai timur mencapai luas sekitar 1,157 Ha.

6. Bagaimana sumbangsi pemerintah di dalam memberikan fasilitas kepada pengunjung kawasan wisata hutan mangrove

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh informan yang bernama petta hasyim salah satu pegawai yang ada di sinjai timur?

*“Sumbangsi yang di berikan pemerintah dalam pengelolaah hutan mangrove di mana pemerintah di sini kawasan mangrove tongeke tongke telah di buat jalanan kayu permanen sepanjang 250 m dengan fasilitas shelter sserta villa terapung dalam kawasan kepariwisataan selain itu pemerintah juga telah menyediakan sarana transportasi laut yang di sediakan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegra, itu adalah sebagai bukti pelayanan pemerintah secara maksimal kepada pengunjung dan sebagai bentuk senergi dala pengelolaan aset wisata tersebut”(wawancara dengan PT tanggal 04 september 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut dengan informan dapat di simpulkan bahwa sumbangsi yang di berikan oleh pemerintah sangat memberikan keuntungan kepada para wisatawan karena dengan fasilitas yang telah di berikan oleh pemerintah mereka bisa lebih menikmati panorama hutan mangrove tongke tongke.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang di angkat dalam penelitian ini, kesimpulannya yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai antara lain meliputi, rehabilitasi di lakukan untuk bertujuan memulihkan kembali ekosistem sumber daya pesisir yang telah mengalami kerusakan, pemeliharaan di lakukan terhadap pengamatan kondisi bibit yang telah di tanam di areal mangrove tersebut pengawasan yang di lakukan terhadap hutan mangrove tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang beraktifitas di areal mangrove
2. Pemerintah sangat berperan aktif di dalam melestariakan hutan mangrove tongke tongke karena pemerintah telah memberikan faslitas kepada masyarakat sekitar berupa bibit mangrove kepada masyarakat dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan hutan mangrove selain itu menjadi suatu kerja sama oleh spemerintah dinas perkebunan dan kehutanan dengan kelompok

masyarakat terjalannya suau kerja sama memberikan dampak positif terhadap pelestarian hutan mangrove yang ada di desa tongke tongke kecamatan sinjai timur.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak terkait tentang manfaat mangrove bagi masyarakat dan sosialisasi penggunaan sistem hukum formal maupun penegakan aturan yang aada dalam masyarakat berkaitan dengan sanksi yang berlaku jika kedapatan dengan sengaja merusak mangrove mengembangkan modal pengelolaan dalam rangka meningkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.
2. Perlunya pendamping kelembagaan secara berkelanjutan dari pihak pemerintah dan perlunya dorongan pemerintah melalui instansi terkait dalam pembentukan kelompok kelompok pelestarian mangrove di desa desa pesisir agar jumlahnya semakin banyak dan perlunya sebagai rangsangan jika ada kelompok yang berhasil melakukan rehabilitasi mangrove.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, w.c, dkk. 2004. *Paduan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. Bogor. Wetlands Internasional.*
- Dave, R., 2006. Mangrove ecosystem of south, west Madagascar: an ecological, human impact, and subsistence value assessment. *Tropical Res. Bulletin* 25: 7 – 13
- Depertemen kehutanan dan perkebunan republic Indonesia dan japan international Agency. 1996. *Manual silvikultural mangrove.* PT Kharisna Intervisi Median. Jakarta.
- Dahrendorf. 1990 : 24 *Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Endraswara, 2006. informasi penelitian kehutanan dan perkebunan.1999'. *selayang pandang penghijauan pantai utara jawa tengah.* Balai RLKT Pemali Jratum. Semarang.
- Fijriah, n.2012. *partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.* nidafijriah.Blogspot.com diakses 21 Januari 2013.
- Gumilar, I. 2012. *Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.* Jurnal Akuatika, Volume 3, No. 2, September 2012.
- Hogarth, P.J., 1999. *The Biology of Mangroves.* Oxford University Press, Oxford
- Himakel. 2012. Peranan Ekosistem Mangrove.Himakel.blogspot.comdiakses 15 Januari 2013.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metode penelitian kualitatif.* Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardijono. 2008. *Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan kawasan Konservasi Laut Kota Batam.* Program Pasca sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, E. Dkk. 2009. *Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata.* Jurnal Ilmiah Bteknik Lingkungan , Volume I, Edisi Khusus.

- Nurdin,N.,& Hambali, H. (2015). Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Seks pada Anak. *Equilibrium*, 3(2), 195-202.
- Onrizal. 2006. *Hutan Mangrove : Bagaimana Memanfaatkan Secara Lestari?* Jurnal Manajemen Dan Kualitas Lingkungan, Volume I, Tahun 2006.
- Primatianti, M. 2002. *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Studi Kasus Kecamatan Kintap dan Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan)*. Program Pascasarjana Institute Pertanian Bogor. Bogor.
- Pramudji. 2012. *Ekosistem Hutan Mangrove dan Peranannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Aquatic*. Jurnal Oseana, Volume XXVI, No. 4 , Tahun 2001.
- Purnamawati, dkk. 2007. *Manfaat Hutan Mangrove Pada Ekosistem Pesisir (Studi Kasus di Kalimantan Barat)*. Jurnal Media Akuakultural, Volume 2, No. 1, Tahun 2007.
- Reymond, P. G. 2010. *Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Gending, Probolinggo*. Jurnal Agriteeg, Volume 18, No. 2, Tahun 2010.
- Ritzer, George.2010 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*. Jakarta . PT. Rajagrafinda Persada.
- Silaen, FA. A. 2012. *Masalah dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau Di Propinsi Bengkulu*. Wwv.Wordpress.Com Diakses 10 September 2013.
- Samadi. 2007. *Geografi 2 SMA Kelas XI*. Bogor. PT. Yudhistira.
- Suciati, 2006. *Parsipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Program Pascasarjana Universitas Di Pene; Semarang.
- Supriatna, J. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suripno. 2003. *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Kepulauan Karimunjawa (Studi Kasus di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan)*. Program Pascasarjana Universitas di Penegoro. Semarang.

- Santoso, S. 2000. *Pengenalan Ekologi Hutan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sardjono 2011. Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja. (online). Tersedia: <https://www.academia.edu/7451287>.
- Susilo,Dwi.Rachmad K. M.A. *sosiologi lingkungan*.Jakarta : Penarbit Buku PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sugiono. 2010. *Metode Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Saptorini, 2003. *Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*.
- Taylor. Bogdandan. imformasi penelitian kehutatanan dan perkebunan.1999'. *selayang pandang penghijauan pantai utara jawa tengah*.
- Tambunan , R, DKK. 2005. *Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kabupaten Asahan (Partisiasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kecamatan Limah Puluh , Kabupaten Asahan)*. Jurnal Studi Pembangunan, Volume 1, No. 1, Oktober 2005.
- Valiela, I., J.L. Bowen, dan J.K. York. 2001. Mangrove Forest: One of the World's Threatened Major Tropical Environments. *Bioscience* 51 (10): 807 – 815.
- Wasp, dan B. Nababan, 2010. Pemetaan dan ana-lisis index vegetasi mangrove di Pulau Saparua, Maluku Tengah. *e - J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 2 (1): 50 – 58,
- Wesli. 2011. *Kajian Spesial dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Utara*. Teras Jurnal, Volume 1, No.1, Maret 2011.
- Walters, BB., P. Ronnback, JM. Kovacs, B. Crona, S.A. Hussain, R. Badola, J.H. Primavera, E. Barbier, dan F. Dahdouh-Guebas, 2008. Ethnobiology, Socio-Economic and Manage-ment of Mangrove Forests: *a review. Aquatic Botany* 89: 220 – 236.
- Rachman Waliulu,1998. *meneliti tentang Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Keamanan Hutan (Kasus Desa Pelang Lor, Kedunggalar - Ngawi)*jurnal volume 1 juni.

## RIWAYAT HIDUP



RAHMI SYAM, Lahir di sinjai, pada tanggal 03 januari 1996. Anak ke dua dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan syamsuddin dan syamsiah penulis menempuh pendidikan sekolah dasar dari MI Nurul Jihad Pintulung mulai tahun 2001 sampai 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Sinjai Barat yang sekarang sudah menjadi SMA Negeri 6 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan di terima sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi Strata 1 (S1), Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, berkat perjuangan dan kerja keras yang di sertai iringan doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi akhirnya selesai juga dengan tersusunnya skripsi yang berjudul Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tongke tongke (studi kasus masyarakat sekitar kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai).

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di tingke tongke kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai (04 september 2017)



Fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah (04 september 2017)



Mangrove yang di tanam di hutan mangrove tongke tongke kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai (04 september 2017)

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

Pedoman wawancara untuk masyarakat dan pemerintah

1. Apa sajakah kendala yang di hadapi saat menanam pohon mangrove?
2. Keuntungan apa sajakah yang di peroleh masyarakat setelah adanya hutan mangrove?
3. Bagaimana cara pengelolaan mangrove yang di lakukan oleh masyarakat?
4. Apa manfaat yang anda rasakan setelah adanya hutan mangrove?

Pedoman wawancara untuk pemerintah

1. Apakah keuntungan daerah dengan adanya hutan mangrove tongke tongke?
2. Bagaimana sumbangsi pemerintah di dalam pengelolaah hutan mangrove ?
3. Bagaimanakah cara yang di lakukan pemerintah terkait dengan rehabilitasi hutan mangrove?
4. Bagaimanakah bentuk konservasi hutan mangrove yang di lakukan oleh pemerintah?
5. Sejak kapan hutan mangrove ada di sinjai?
6. Bagaimana sumbangsi pemerintah di dalam memberikan fasilitas kepada pengunjung kawasan wisata hutan mangrove?

## DAFTAR INFORMAN

Berikut ini merupakan daftar informan yang di temui oleh peneliti dalam melakukan penelitian:

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Status /pekerjaan
1.	Ahmad	L	40	Masyarakat
2.	Subaedah	P	32	masyarakat
3.	Sanuddin	L	44	Masyarakat
4.	Imran	L	50	Masyarakat
5.	Sahrul Paesa	L	30	Sekretaris camat sinjai timur
6.	Tamzil binawan	L	58	Camat sinjai timur
7.	Nurfadillah	P	25	Pegawai kantor kecamatan sinjai timur
8.	Musdalifah	P	26	Pegawai kantor kecamatan sinjai timur
9.	H.Abd.Salam Dg.Bali	L	53	Anggota DPRD kab.Sinjai
10.	Petta hasyim	L	55	Pegawai kantor camat sinjai timur

